

**FUNGSI *CONTROLLING* DINAS PERHUBUNGAN
DALAM MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ADZRA ADELIA BR. SINAGA
2203100045

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ADZRA ADELIA BR. SINAGA**

NPM : 2203100045

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

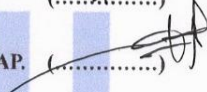
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026

Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP,M.Pd.** 

PENGUJI II : **WINDA S MELIALA, S, Sos.,MSP.** 

PENGUJI III : **Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.** 

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr, Affin Saleh., S.Sos., MSP 

Assoc.,Prof., Dr, Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom 



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **ADZRA ADELIA BR. SINAGA**
NPM : 2203100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Controlling Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar Di Kabupaten Deli Serdang

Medan, 09 April 2026

Pembimbing


Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP
NIDN : 0120018303

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP
NIDN : 0122118801


Assoc.,Prof., Dr. Afan Saleh., S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **ADZRA ADELIA BR. SINAGA**, NPM 2203100045, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, 18 April 2026

Yang Menyatakan,



ADZRA ADELIA BR. SINAGA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang**”, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan demikian penulis mengharapkan bahwa tugas akhir yang telah disusun ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga mendapatkan kontribusi nyata berupa ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan Pendidikan Strata – 1(SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih teruntuk Ayahanda tersayang Abdul Haris Sinaga, *Allahu yarham*, nahkoda yang telah lebih dulu menepi ke keabadian sebelum sempat melihat kapal ini bersandar di pelabuhan. Skripsi ini adalah surat yang kutulis dengan tinta rindu, bingkisan kecil untuk seorang lelaki yang pundaknya

pernah menjadi bumi tempatku berpijak. Kehilanganmu adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya terisi, tetapi justru dari ruang itulah aku belajar tentang teguh dan mengerti. Hari ini, selain rindu dan doa, kuhaturkan gelar S.AP ini untukmu sebagai bagian dari janji kecil yang dulu ingin kubuktikan: *“bahwa aku akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah”*. Terimakasih telah menjadi fondasi pertama dalam hidupku, mengajarkanku tentang tanggung jawab, tentang harga diri, tentang keberanian berdiri di atas kakiku sendiri. Jika suatu hari aku terlihat tegar, itu karena aku membawa sebagian jiwamu bersamaku. Semoga setiap doa yang kupanjatkan sampai kepadamu sebagai peluk yang tak sempat kuberikan. Dan semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik, sebagaimana engkau pernah menjadi tempat terbaik bagiku.

Teruntuk wanita mulia tersayang yaitu Ibunda Mismawati, Terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik, setiap nasihat yang diberikan, Dan terimakasih atas perjuangan yang selama ini engkau berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Terimakasih pula atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan Pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan, ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia, Aamiin.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izahsyah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. Agung Saputra S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis.

9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Juru Parkir, dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Abang penulis Rifky Ananda Sinaga, Kakak Yusnawati Amini dan Adik penulis Firda Aulia Sinaga yang telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Dan terimakasih selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok adik atau kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
12. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Anugrah Aulia Syaf. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah, Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
13. Kepada sahabat terbaik penulis Ade Willianie Putri, Astha Salsabilla, Aliya, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kehadiranmu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak

ternilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terimakasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui Bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu.

14. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Meskipun dengan perjalanan hidup yang tidak selalu sempurna, terimakasih sudah memilih untuk bertahan dan mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang telah dilalui. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.AP tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 April 2026

Penulis

Adzra Adelia Br. Sinaga

2203100045

**FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI
KABUPATEN DELI SERDANG**

ADZRA ADELIA BR. SINAGA
2203100045

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pungutan parkir liar di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di wilayah Lubuk Pakam, yang menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keresahan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana fungsi *controlling* dijalankan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi *controlling* Dinas Perhubungan dalam menertibkan pungutan parkir liar di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan seperti Kepala Seksi Perparkiran, juru parkir, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *controlling* dilakukan melalui empat indikator utama, yaitu penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, perbandingan kinerja dengan standar, dan tindakan korektif berupa penertiban lapangan. Simpulan penelitian ini menekankan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin melalui patroli, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan guna meminimalkan penyimpangan tarif dan aktivitas juru parkir ilegal demi terciptanya ketertiban transportasi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: *Controlling*, Dinas Perhubungan, Parkir Liar, Penertiban.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Pembatasan Masalah | 6 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 9 |
| 2.1 Teori Koontz & O'Donell..... | 9 |
| 2.2. Fungsi <i>Controlling</i> | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Fungsi <i>Controlling</i> | 10 |
| 2.2.2. Tujuan <i>Controlling</i> | 11 |
| 2.2.3. Fungsi <i>Controlling</i> Dinas Perhubungan..... | 13 |
| 2.3. Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir..... | 14 |
| 2.3.1 Pengertian Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir..... | 14 |
| 2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan..... | 16 |
| 2.3.3. Pentingnya <i>Controlling</i> Pada Bidang Perparkiran..... | 18 |
| 2.4. Penertiban Pungutan Parkir Liar | 19 |
| 2.4.1 Pengertian Parkir Liar | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4.2. Faktor Penyebab Munculnya Parkir | 21 |
| 2.4.3 Dampak Parkir Liar | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2. Kerangka Konsep | 26 |
| 3.3. Defenisi Konsep | 26 |
| 3.4. Kategorisasi Penelitian | 27 |
| 3.5. Informan atau Narasumber | 28 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| 3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian | 31 |
| 3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 31 |
| 3.9.1. Profil Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang | 31 |
| 3.9.2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 33 |
| 4.1.1 Penetapan Standar Kinerja..... | 34 |
| 4.1.2 Pengukuran Kinerja Aktual..... | 36 |
| 4.1.3 Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar Kinerja | 37 |
| 4.1.4 Tindakan Korektif..... | 38 |
| 4.2 Pembahasan | 40 |
| 4.2.1 Penetapan Standar Kinerja..... | 40 |
| 4.2.2 Pengukuran Kinerja Aktual..... | 41 |
| 4.2.3 Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar Kinerja | 42 |
| 4.2.4. Tindakan Korektif..... | 43 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 45 |
| 5.1 Simpulan..... | 45 |
| 5.2. Saran..... | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Draft Wawancara |
| Lampiran II | : SK-1 Permohonan ersetujuan judul tugas akhir mahasiswa |
| Lampiran III | : SK-2 Surat penetapan judul dan pembimbing tugas akhir |
| Lampiran IV | : SK-3 Permohonan seminar proposal tugas akhir |
| Lampiran V | : SK-4 Undangan seminar proposal tugas akhir |
| Lampiran VI | : SK-5 Berita acara bimbingan skripsi |
| Lampiran VII | : Surat izin penelitian Universitas |
| Lampiran VIII | : Surat rekomendasi Bakesbangpol Deli Serdang |
| Lampiran IX | : Surat izin penelitian Bappedalitbang Deli Serdang |
| Lampiran X | : Surat selesai riset Dinas Perhubungan Deli Serdang |
| Lampiran XI | : Surat bebas pinjaman buku |
| Lampiran XII | : SK-10 Undangan panggilan ujian skripsi |
| Lampiran XIII | : LoA Jurnal |
| Lampiran XIV | : Dokumentasi |
| Lampiran XV | : Daftar Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan perparkiran merupakan bagian integral dari sistem transportasi daerah karena tidak hanya berfungsi sebagai pendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan arus lalu lintas dan sumber pemasukan daerah. Sistem transportasi yang baik memerlukan tata kelola parkir yang terencana, teratur, dan diawasi dengan baik untuk mencegah kemacetan, penurunan estetika kota, dan ketidakteraturan penggunaan ruang jalan. Dalam konteks ini, keberadaan sistem perparkiran yang tertib menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan ruang kota.

Transportasi umum dan lahan parkir merupakan elemen penting dalam pengelolaan pemerintah daerah, karena keduanya saling memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan peluang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam teori, pengelolaan lahan parkir seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang resmi, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemungutan retribusi dapat dianggap sah, teratur, dan berkontribusi pada pembangunan wilayah tersebut. Dalam konteks administrasi publik, fungsi manajemen, terutama controlling, menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan retribusi parkir dilaksanakan sesuai dengan aturan, menghindari penyimpangan, dan memastikan bahwa pendapatan retribusi secara benar masuk ke dalam kas daerah.

Fungsi *Controlling* dalam organisasi publik memiliki peran penting untuk menjaga keselarasan antara kebijakan retribusi parkir dan penerapan kinerja lapangannya. Menurut teori manajemen pengawasan atau *Controlling* merupakan salah satu aspek penting dari aspek manajemen lainnya, baik dalam organisasi profit maupun nonprofit. Tujuan dari tindakan pengawasan dalam alur manajemen organisasi adalah untuk menetapkan batasan-batasan kegiatan yang sudah tertata rapi sejak awal (Maskun dkk, 2022). Menurut Koontz & O'Donell (1976) dalam buku yang berjudul *Principles of management* “Pengendalian adalah Pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk mencapai tujuan tertentu yakin bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk memperolehnya adalah tercapai”.

Kewenangan untuk mengatur parkir dan biaya layanan parkir diberikan kepada pemerintah kabupaten melalui peraturan daerah. Termasuk di Kabupaten Deli Serdang, pengaturan biaya parkir di tepi jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa biaya parkir dijalan umum merupakan bagian dari retribusi untuk layanan publik. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan retribusi untuk layanan usaha (termasuk parkir khusus) dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur kategori dan biaya retribusi parkir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang memiliki peran penting dalam mengawasi parkir melalui rencana strategis mereka. Dalam rencana strategis (Renstra) perubahan Dinas Perhubungan untuk periode 2019-2024, pengendalian dan pengawasan terhadap parkir menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong

sistem transportasi yang tertib, transparan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Meskipun aturan yang sudah ditetapkan, di lapangan banyak terdapat pelanggaran akibat tindakan pungutan parkir ilegal yang terjadi di beberapa jalan di Kabupaten Deli Serdang yang tidak diawasi dengan baik oleh pihak berwenang.

Dalam konteks Dinas Perhubungan, fungsi *Controlling* memiliki peran yang sangat strategis karena Dinas ini bertanggung jawab untuk pengaturan, pengawasan, dan penertiban lalu lintas serta transportasi, termasuk penanganan parkir liar. Hubungan antara *Controlling* dan Dinas Perhubungan terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas transportasi di ruang publik. Melalui fungsi *controlling*, Dinas Perhubungan dapat melakukan perbandingan antara peraturan yang ada (peraturan daerah, SOP, dan kebijakan teknis) dengan kondisi faktual di lapangan. Dinas Perhubungan Deli Serdang berkomitmen pada pelayanan publik. Sistem kerja berbasis SOP. Pelaporan, monitoring, evaluasi dijalankan rutin. Dukungan teknologi diterapkan pada beberapa layanan administratif.

Jika terdapat penyimpangan, seperti pungutan parkir ilegal atau pengguna jalan sebagai area parkir tanpa izin, maka Dinas Perhubungan memiliki landasan untuk menerapkan tindakan korektif berupa penertiban, penindakan, maupun evaluasi kebijakan. Dengan demikian, Fungsi *Controlling* berperan sebagai alat bagi Dinas Perhubungan untuk menjaga ketertiban lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pengelolaan transportasi yang aman, tertib, dan sesuai regulasi. Dengan adanya indikator *Controlling* seperti penetapan

standar, pengawasan lapangan, penilaian pelanggaran, Tindakan korektif, dan evaluasi menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Menurut berita dari Time Sumut (2025), Camat Lubuk Pakam mengungkapkan bahwa para penjaga parkir ilegal memungut biaya parkir dari kendaraan tanpa adanya prosedur resmi, dan uang yang di pungut di duga tidak masuk ke kas daerah, melainkan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa cara pemungutan parkir ilegal ini terjadi di sepanjang Jalan Sutomo, serta di jalan-jalan lain seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Negara, Tj Garbus I dan Jalan Tengku Raja Muda. Kasus ini semakin dikuatkan melalui laporan dari Metro Online yang mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Lubuk Pakam tidak hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tetapi juga dianggap tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari pihak berwenang.

Fenomena ini terlihat jelas di berbagai titik keramaian di Kabupaten Deli Serdang, Khususnya di daerah Lubuk Pakam. Di dua jalur penting yaitu di Jalan Negara dan Jalan Dokter Sutomo tercatat sebagai lokasi yang paling sering terjadinya aktivitas pungutan parkir secara ilegal. Tingginya tingkat aktivitas yang terjadi pada Jalan Dokter Sutomo karena adanya aktivitas perekonomian, mobilitas kendaraan yang tinggi, serta kurangnya pengawasan yang intensif dapat menjadikan tempat tersebut sebagai titik rawan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan di luar aturan yang berlaku.

Situasi ini semakin diperkuat dengan berita dari Mistar.id terdapat adanya praktik parkir ilegal di lokasi padat pengunjung seperti di Jalan Negara, Tanjung Garbus I, Terutama di sekitar Masjid Agung Sulthan Agung Deli Serdang, yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk beribadah atau menghadiri acara keagamaan berskala besar. Pada beberapa kesempatan tertentu, seperti hari jumat, bulan suci Ramadhan, ataupun acara keagamaan lainnya, Lokasi tersebut menjadi tempat yang paling sering munculnya pungutan parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai dan tanpa identitas resmi dari petugas.

Menurut berita dari Posmetro Medan 2025 Polsek Lubuk Pakam dilaporkan telah menangkap dua orang juru parkir yang diduga terlibat dalam pungutan liar di kawasan kota Lubuk Pakam, sebagai reaksi terhadap keluhan dari masyarakat. Kejadian ini menunjukkan bahwa keberadaan juru parkir ilegal di jalan Sutomo bukanlah fenomena insidental, tetapi merupakan isu dalam sistem pengawasan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam konteks tugas fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Gading Widi Arianty dan Siti Hazzah Nur R (2024) dalam “Monitoring Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan” Penelitian ini mengkaji efektivitas monitoring parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam upaya menertibkan juru parkir liar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui patroli dan razia bersama instansi terkait, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan mengurangi praktik pungutan liar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya teknologi pendukung seperti CCTV, tumpang tindih kewenangan, serta faktor eksternal seperti perlindungan terhadap juru parkir liar dan kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan jasa mereka (Arianty, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa belum terdapat kajian yang secara spesifik dalam membahas topik *controlling* parkir liar khususnya di daerah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut, dengan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan pada bidang yang relevan. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini secara sistematis dan mendalam.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi *controlling* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji tentang **“Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Adapun fokus dan lokus yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam menjelaskan Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan

Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang, terutama di Jalan Dokter Sutomo dan Jalan Negara, Tj.Garbus I, Lubuk Pakam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang”.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Aspek Teoritis, Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang.
2. Aspek Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi nyata untuk Dinas Perhubungan di Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat koordinasi petugas, serta mendorong peningkatan kepatuhan pengelola parkir di lapangan.

3. Aspek Akademis, Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian fungsi controlling, Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir daerah, Faktor penyebab munculnya parkir, dan Penertiban pungutan parkir liar.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Koontz & O'Donell

Teori Koontz & O'Donell terkait dengan fungsi controlling menjelaskan bahwa pengendalian adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini berperan sebagai alat penilaian untuk mengamati apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian, pemimpin dapat memantau pelaksanaan tugas, menilai hasil yang diperoleh, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan dari standar yang telah ditentukan (Koontz & O'Donell, 1972).

Menurut Koontz & O' Donell, proses pengendalian terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu penetapan standar kerja, pengukuran kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja, dan Tindakan korektif apabila ada penyimpangan. Tahapan ini menunjukkan bahwa controlling bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mencakup proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan adanya standar yang jelas, organisasi memiliki pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan (Koontz & O'Donell, 1972).

Dalam lingkungan organisasi baik yang bersifat publik maupun swasta, peran pengendalian memiliki kualitas untuk mempertahankan mutu kinerja dan memperkuat akuntabilitas suatu organisasi. Dengan adanya pengendalian, para pemimpin dapat dengan cepat mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan

dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai agar sasaran organisasi tetap dapat dicapai. Oleh karena itu, teori yang dikemukakan oleh Koontz & O'Donell sering dijadikan acuan dalam kajian administrasi publik untuk mengevaluasi keefektifan pengawasan dan pengendalian suatu instansi atau lembaga (Koontz & O'Donell, 1972).

2.2. Fungsi *Controlling*

2.2.1 Pengertian Fungsi *Controlling*

Menurut Koontz & O'Donell (1976) dalam buku yang berjudul *Principles of management* "Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk mencapai tujuan tertentu yakin bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk memperolehnya adalah tercapai". Pengendalian memiliki langkah-langkah berikut: (a) Penetapan standar kinerja, (b) Pengukuran kinerja aktual, (c) Perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja, dan (d) Tindakan korektif (Koontz & O'Donell, 1972).

Sedangkan menurut George R. Terry (1960) dalam buku yang berjudul *Principles of management* pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jelas sekali bahwa fungsi pengawasan yang diambil dari sudut pandang definisi sangat penting dalam suatu perusahaan. Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana.

Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien (Dakhi, 2016).

Sementara itu, menurut Robbins Stephen P., *controlling* adalah proses pemantauan aktivitas untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, serta melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan yang signifikan. Robbins menekankan pentingnya *controlling* sebagai mekanisme umpan balik dalam manajemen yang membantu organisasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya (Robbins & Coulter, 2016).

Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi *controlling* merupakan suatu proses sistematis dalam manajemen yang meliputi penetapan standar, pemantauan dan pengukuran kinerja, evaluasi hasil kerja, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, *controlling* menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas, akuntabilitas, dan keberhasilan organisasi.

2.2.2. Tujuan *Controlling*

Pada dasarnya tujuan pengawasan secara tidak langsung dapat dicermati dari batasan pengertian pengawasan tersebut, yakni suatu upaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. *Controlling* sendiri merupakan pengawasan serta pengendalian. *Controlling* sangat berperan penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan dengan baik mencapai

tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Maka dengan itu langkah yang harus diambil dalam *Controlling* mengamati, menilai, mengevaluasi dan mengoreksi setiap langkah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana atau sebaliknya (Syahputra dan Aslami, 2023).

Tujuan dari pengawasan atau controlling pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan gerak organisasi yang sedang berlangsung dengan tujuan dan rencana awal (planning) dari organisasi itu sendiri. Dalam aspek ini, controlling memusatkan pada sisi efisiensi, sedangkan perencanaan atau planning lebih memusatkan pada sisi efektivitas. Walaupun di dalam proses pengendalian juga terdapat unsur efektivitas, namun secara fungsi bahwa upaya pengendalian lebih berpusat pada unsur efisiensi. Dengan demikian, controlling atau yang di dalam istilah Indonesia bermakna pengendalian, pengawasan atau kontrol, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian pergerakan antara organisasi dengan tujuannya (Wicahyaningtyas, 2022).

Tujuan dari tindakan pengawasan dalam alur manajemen organisasi adalah untuk menetapkan batasan-batasan kegiatan yang sudah tertata rapi sejak awal (Maskun et al., 2022). Dalam controlling ini fokus kinerja pada tingkat efisiensi atau kesesuaian, perencanaan lebih menitikberatkan pada efektivitas. Dari segi kepantasan harus ada efektivitas, tetapi dari segi fungsi pengawasan lebih ditekankan pada efisiensi atau kepatutan. Menurut uraian tersebut, kata “pengendalian” atau “pengawasan” dalam pengertian bahasa Indonesia adalah pekerjaan sederhana yang dapat diartikan sebagai langkah menuju kesesuaian dengan organisasi dan tujuan organisasi (Millah dkk., 2023).

Secara keseluruhan, tujuan pengawasan atau controlling dalam manajemen organisasi adalah untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana awal guna mencapai tujuan yang diinginkan, melalui proses mengamati, menilai, mengevaluasi, dan mengoreksi. Pengawasan ini menyesuaikan gerak organisasi dengan planning, dengan penekanan utama pada efisiensi meskipun juga mencakup efektivitas. Dengan demikian, controlling berfungsi sebagai langkah penyesuaian yang menjaga keselarasan antara aktivitas organisasi dan sasaran efisiennya.

2.2.3. Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan

Fungsi pengendalian di Dinas Perhubungan adalah proses pemantauan atas pelaksanaan tanggung jawab di sektor transportasi, termasuk pengaturan arus lalu lintas, manajemen tempat parkir, dan penegakan ketentuan angkutan umum. Dengan adanya fungsi ini, lembaga menjamin bahwa semua aktivitas operasional berlangsung sesuai dengan norma dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemantauan dilakukan melalui pengawasan di lapangan, penilaian kinerja personel, serta penerapan sistem pelaporan yang terorganisir untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan sejak awal (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Selain itu, peran pengendalian juga meliputi usaha untuk menilai sejauh mana kebijakan transportasi yang sudah diterapkan berjalan dengan efektif. Dinas Perhubungan melakukan analisis antara target yang telah direncanakan dengan hasil yang terjadi di lapangan, contohnya dalam menertibkan parkir tidak resmi atau mengurangi kemacetan. Jika terdapat perbedaan, langkah-langkah perbaikan akan diambil seperti penerapan sanksi, peningkatan pengawasan, dan perbaikan dalam sistem pelayanan. Tujuan dari ini semua agar kinerja organisasi tetap sesuai dengan

sasaran yang telah ditentukan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menjalankan berbagai fungsi, salah satunya adalah membuat dan melaksanakan kebijakan. Ini termasuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan lalu lintas, angkutan jalan, pelayaran, kereta api, dan penerbangan yang menjadi tanggung jawab daerah serta tugas yang diberikan kepada Kabupaten atau Kota. Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi di tingkat Kabupaten atau Kota dan menjalankan fungsi serta tugas lain yang diberikan oleh bupati atau walikota yang berhubungan dengan pekerjaan dan fungsinya (Sandra, 2024).

Dengan mengacu kepada tiga penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan di Dinas Perhubungan adalah rangkaian proses yang teratur dan berkesinambungan, yang mencakup pemantauan pelaksanaan aktivitas, penilaian kinerja, dan langkah-langkah perbaikan terhadap penyimpangan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan di sektor transportasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta menciptakan layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas.

2.3. Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir

2.3.1 Pengertian Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir

Pengertian Dinas Perhubungan dalam manajemen parkir bisa diartikan sebagai fungsi dari lembaga pemerintah setempat yang memiliki tanggung jawab

untuk mengatur, mengawasi, serta mengontrol sistem perparkiran demi mendukung kelancaran arus lalu lintas dan keteraturan publik. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan diizinkan untuk merumuskan kebijakan parkir, menetapkan area parkir resmi, dan mengelola pendapatan dari parkir sebagai bagian dari anggaran daerah. Manajemen parkir yang efektif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pelayanan transportasi kota karena berhubungan langsung dengan pergerakan masyarakat (Siregar, 2019).

Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi, kabupaten, kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat (Elva Novitasari, Indarja, 2019).

Selain itu, Dinas Perhubungan juga memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan parkir di lapangan. Ini melibatkan penempatan petugas parkir resmi, pemantauan praktik parkir ilegal, serta penerapan sistem parkir yang didukung teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan parkir sangat bergantung pada seberapa efektif pengawasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait,

termasuk lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah (Pratama & Lestari, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan memegang peranan penting dalam pengelolaan parkir terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem perparkiran. Tugas ini meliputi penetapan kebijakan, pengelolaan operasional di lapangan, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. Melalui pengelolaan parkir yang efisien, Dinas Perhubungan dapat berkontribusi terhadap kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan pemasukan daerah, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan untuk masyarakat.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas dan peranan Dinas Perhubungan pada dasarnya berhubungan dengan pengelolaan masalah pemerintahan terkait transportasi yang mencakup darat, laut, dan udara di tingkat lokal. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, menjalankan operasional, serta mengawasi sistem transportasi agar berfungsi dengan tertib, aman, dan lancar. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga memiliki kewajiban untuk merencanakan kebutuhan infrastruktur transportasi, seperti tanda lalu lintas, garis jalan, serta fasilitas tambahan lainnya demi meningkatkan keselamatan bagi para pengguna jalan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Fungsi Dinas Perhubungan meliputi pelaksanaan kontrol dan pengawasan terhadap lalu lintas serta transportasi jalan, termasuk penataan kendaraan umum dan manajemen tempat parkir. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan memiliki peran

aktif dalam menyelesaikan beragam masalah transportasi, seperti kemacetan, pelanggaran peraturan lalu lintas, dan praktik parkir ilegal. Tugas ini juga mencakup kerjasama dengan lembaga lain, seperti pihak kepolisian dan pemerintah daerah, untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif oleh Dinas Perhubungan dapat meningkatkan ketertiban di jalan serta kualitas layanan publik dalam sektor transportasi (Putra & Anggraini, 2021).

Selain itu, Dinas Perhubungan memainkan peran penting dalam pelayanan publik yang fokus pada kepuasan rakyat, contohnya dalam menyediakan layanan uji kendaraan bermotor (KIR), pengelolaan terminal, dan pengembangan sistem transportasi yang berbasis teknologi. Di zaman digital ini, banyak Dinas Perhubungan mulai mengimplementasikan sistem informasi transportasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan. Fungsi ini menekankan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penghubung dalam menciptakan sistem transportasi yang modern dan berkelanjutan (Halim & Nugroho, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan sangat beragam dan penting dalam pengelolaan transportasi. Lembaga ini tidak hanya terlibat dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan operasional, pengawasan, dan pelayanan masyarakat. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, Dinas Perhubungan dapat menciptakan sistem transportasi yang teratur, aman, efisien, dan mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.

2.3.3. Pentingnya *Controlling* Pada Bidang Perparkiran

Pentingnya pengendalian dalam sektor parkir terlihat dari kontribusinya dalam menjamin ketertiban dan organisasi penggunaan ruang parkir di area perkotaan. Tanpa pengelolaan yang tepat, praktik parkir sembarangan cenderung meningkat dan menimbulkan kemacetan serta penurunan kualitas layanan publik. Melalui fungsi pengendalian, lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan dapat mengawasi aktivitas parkir, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menanggapi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pengendalian menjadi alat yang krusial dalam memelihara disiplin dan ketertiban sistem parkir (Pratama & Lestari, 2021).

Selain itu, pengelolaan dalam sektor parkir juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi kehilangan pendapatan karena kegiatan ilegal dapat dikurangi. Pengendalian yang terorganisir, seperti penerapan teknologi untuk parkir elektronik dan sistem pemantauan digital, dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan parkir. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Hidayat, 2020).

Pengendalian dalam sektor perparkiran memiliki peranan krusial dalam menjaga keselamatan serta kenyamanan para pengguna jalan. Parkir yang tidak teratur dapat mengganggu laju kendaraan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, manajemen yang baik memungkinkan

adanya penilaian rutin terhadap kebijakan parkir, penempatan lokasi parkir yang strategis, serta peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Dengan pengendalian yang maksimal, sistem perparkiran dapat berlangsung dengan lebih teratur, aman, dan berfokus pada kepentingan publik (Siregar, 2019).

Berdasarkan tiga penjelasan yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan dalam sektor parkir sangat krusial untuk menjaga ketertiban, meningkatkan efisiensi manajemen, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat. Tugas ini meliputi monitoring, penilaian, serta langkah-langkah perbaikan terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan parkir. Dengan adanya pengendalian yang efektif, sistem parkir bisa berfungsi dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah.

2.4. Penertiban Pungutan Parkir Liar

2.4.1 Pengertian Parkir Liar

Parkir liar mengacu pada tindakan menempatkan kendaraan di tempat yang tidak ditunjukkan sebagai lokasi parkir yang resmi atau tanpa persetujuan dari otoritas setempat. Aktivitas ini biasanya terjadi di tepi jalan, jalan kaki, atau ruang publik lain yang seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan umum. Parkir tidak sah tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Siregar, 2019).

Selain itu, parkir tanpa izin juga dapat diartikan sebagai praktik pengelolaan tempat parkir yang dilakukan secara ilegal oleh orang atau kelompok tanpa adanya otorisasi resmi, yang sering kali diiringi dengan pemungutan biaya kepada pengguna layanan parkir. Dalam hal ini, parkir ilegal tidak hanya berkaitan dengan lokasi parkir yang tidak tepat, tetapi juga dengan aktivitas ekonomi yang melanggar hukum yang merugikan pemerintah daerah karena mengakibatkan hilangnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Fenomena ini banyak dijumpai di daerah perkotaan dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi (Pratama & Lestari, 2021).

Parkir liar menjadi salah satu isu dalam transportasi di perkotaan yang berpengaruh besar terhadap kelancaran lalu lintas serta keselamatan pengendara. Kendaraan yang diparkir sembarangan dapat memperkecil ruang gerak kendaraan lain dan menambah kemungkinan terjadinya kemacetan, serta mengancam pejalan kaki. Maka dari itu, parkir yang tidak teratur sering disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor transportasi, sehingga pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan tindakan yang lebih serius (Hidayat, 2020).

Berdasarkan tiga penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa parkir ilegal merupakan tindakan memarkir kendaraan dan/atau pengelolaan tempat parkir yang dilakukan tanpa izin, baik dalam hal lokasi maupun persetujuan, yang melanggar regulasi yang ada. Aktivitas ini tidak hanya mempengaruhi ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi serta mengganggu kenyamanan dan keamanan publik. Dengan demikian, penanganan terhadap parkir

ilegal memerlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang solid, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

2.4.2. Faktor Penyebab Munculnya Parkir

Faktor yang mendorong hadirnya parkir pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan yang semakin tinggi di masyarakat untuk ruang penyimpanan kendaraan seiring pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Pertambahan ini tidak selalu sejalan dengan tersedianya lahan parkir yang cukup, terutama di area urban yang sangat aktif. Situasi ini membuat masyarakat mencari ruang-ruang yang ada, baik yang resmi maupun tidak, untuk dijadikan tempat parkir. Dengan kata lain, kebutuhan akan tempat parkir merupakan hasil langsung dari peningkatan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat (Hidayat, 2020).

Aspek perencanaan tata ruang kota dan transportasi juga berperan sebagai penyebab permasalahan parkir. Rencana yang tidak ideal, seperti kurangnya fasilitas parkir di lokasi seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan tempat umum, membuat kendaraan terpaksa diparkir di jalan. Ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, sehingga praktik parkir yang tidak teratur semakin meluas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara permintaan dan ketersediaan fasilitas parkir merupakan faktor utama timbulnya masalah parkir di daerah perkotaan (Pratama & Lestari, 2021).

Unsur sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap munculnya parkir, khususnya parkir ilegal. Tingginya angka pengangguran dan keterbatasan peluang

kerja mendorong sebagian orang untuk mengambil kesempatan menjadi juru parkir tidak resmi. Di sisi lain, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas juga memperburuk situasi ini, karena pengguna kendaraan cenderung memilih untuk parkir di tempat yang lebih dekat dengan tujuan meskipun melanggar aturan. Ini menunjukkan bahwa masalah parkir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial dan perilaku masyarakat (Siregar, 2019).

Berdasarkan ketiga argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya parkir meliputi peningkatan jumlah kendaraan, keterbatasan fasilitas parkir, perencanaan ruang yang tidak efektif, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini bersifat rumit karena melibatkan berbagai aspek, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sistem parkir dengan baik agar tercipta ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

2.4.3 Dampak Parkir Liar

Dampak dari tindakan parkir liar ini cukup besar selain mengganggu ketertiban di area parkir, praktek ini juga merugikan pengguna jasa parkir yang harus membayar tarif yang tidak sesuai dengan standar resmi. Praktek ini juga menjadi sumber penghasilan pribadi bagi para pelaku parkir liar, hal ini berdampak negatif pada lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Parkir liar umumnya timbul karena ketidakcukupan infrastruktur tata kota, di mana terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan parkir dan permintaan masyarakat. Ketidakseimbangan ini sering disebabkan oleh perencanaan kota yang kurang

memperhitungkan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir yang meningkat (Moufad & Jawab, 2020).

Parkir ilegal memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran lalu lintas, terutama di wilayah kota dengan mobilitas yang sangat tinggi. Kendaraan yang diparkir sembarangan di jalan atau trotoar dapat mengurangi luas jalan, yang berakibat pada hambatan arus kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, situasi ini juga memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena mengganggu pandangan pengemudi dan pergerakan pejalan kaki. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa parkir ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga merupakan isu serius dalam pengelolaan transportasi di kota (Hidayat, 2020).

Selain berdampak pada lalu lintas, parkir ilegal juga menyebabkan kerugian ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik. Praktik pemungutan parkir secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang bisa menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya dapat digunakan untuk proyek pembangunan. Di sisi lain, keberadaan parkir ilegal juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat akibat kurangnya jaminan keamanan bagi kendaraan serta tidak adanya standar layanan yang jelas. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor perparkiran (Pratama & Lestari, 2021). Dapat disimpulkan bahwa parkir liar adalah isu signifikan yang merusak arus lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan warga serta menyebabkan kerugian finansial akibat pungutan yang tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam tentang bagaimana fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan dalam menertibkan pungutan parkir liar, termasuk proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi di lapangan. Menurut (Mahardika, 2021) dalam (Malinda, 2022) Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Malinda, 2022).

Pendekatan deskriptif dilakukan untuk menggambarkan fenomena apa adanya berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik yang berlangsung nyata di lingkungan kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi empiris melalui data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono dalam Yusnidar Lase (2023), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

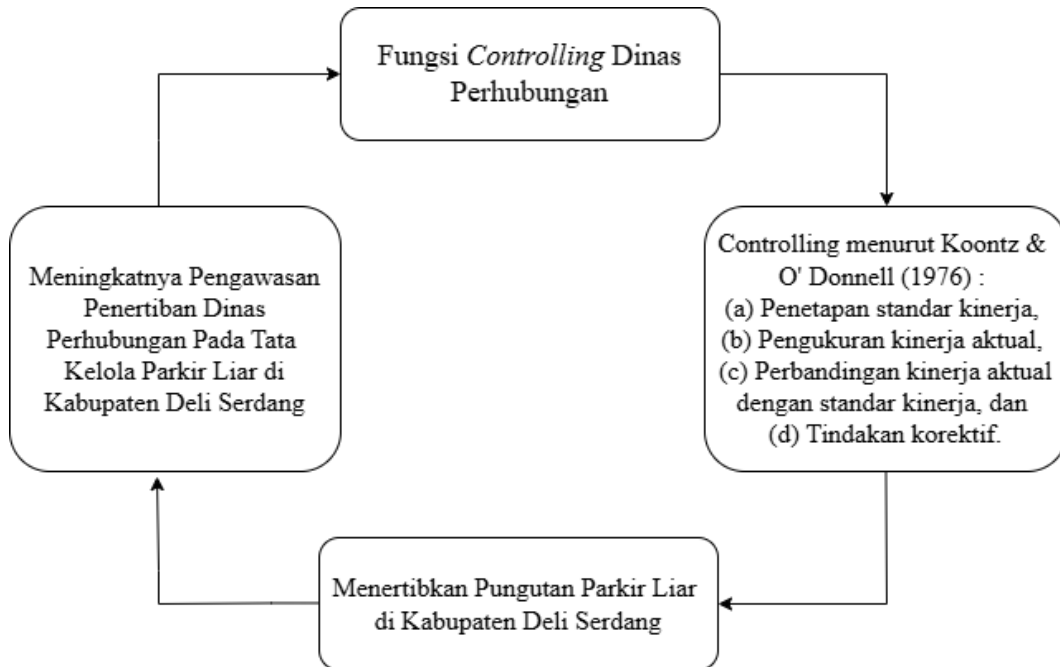
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Yusnidar Lase, 2023).

Menurut Khairi dkk (2022), Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya. Sedangkan menurut (Aprilia & Saputra, 2022) Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian ini karena penulis menentukan judul tentang Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, maka penulis mengambil pendekatan yang cocok digunakan yaitu penelitian kualitatif dikarenakan penulis membutuhkan beberapa observasi wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dilakukan dalam penelitian untuk meningkatkan fokus penelitian dan dapat mempermudah penyusunan dan evaluasi yang sistematis.



3.3. Defenisi Konsep

- a. *Controlling*, pengawasan ini merupakan penerapan suatu cara atau tools yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dapat terjadi dalam dua sisi, yaitu pengawasan postif dimana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien.
- b. Dinas Perhubungan adalah bagian dari pemerintah daerah yang bertugas untuk merancang, melaksanakan, dan mengatur kebijakan dalam transportasi. Tujuannya adalah untuk membuat sistem transportasi yang aman, rapi, lancar, dan efisien. Dinas ini juga berfungsi sebagai penghubung

antara pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan transportasi yang mengutamakan kepentingan umum.

- c. Parkir Liar, bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larang parkir bahu jalan, larangan di tetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih di utamakan dari pada memberi akses keselamatan. dapat di artikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan Yang merugikan hak-hak orang lain. parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data tersebut. Melalui ini kita bisa melihat bagaimana sesuatu dimasukkan ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kategori ini membantu menjelaskan hubungan antara subjek dan objek dalam suatu konteks pengetahuan.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Penetapan standar kinerja

- b) Pengukuran kinerja aktual
- c) Perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja
- d) Tindakan korektif

3.5. Informan atau Narasumber

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Deli Serdang
- b. Juru parkir resmi
- c. Juru parkir tidak resmi
- d. Masyarakat pengguna jasa parkir

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

- a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif melakukan observasi melalui keterlibatan langsung di lapangan penelitian untuk melihat perilaku dan kegiatan yang akan di analisis. Peneliti dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan data sebagai bagian dari partisipan yang hanya melakukan pengamatan.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang melibatkan hubungan langsung antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai suatu isu. Dalam proses wawancara, orang yang melakukan wawancara bisa menerapkan berbagai pendekatan, seperti menyampaikan pertanyaan yang terstruktur, maupun tidak terstruktur, sesuai dengan tujuan riset serta kebutuhan data yang di inginkan.

2. Data Primer

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui informasi dan evaluasi berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tulisan, gambar, serta elektronik.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh melalui karya ilmiah, buku, maupun pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang

diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Adapun teknik analisa data yang penulis ambil yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah Peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kw. Pemerintahan Deli Serdang, Jl. Mawar No.1, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari 07 November 2025.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah perubahan dari Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Deli Serdang yang terbentuk pada tahun 1994. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 04 pada tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Pengangkutan Jalan/DLLAJ Kabupaten Deli Serdang, serta berdasarkan UU No.22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah, maka dirubahlah Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan/DLLAJ Kabupaten Deli Serdang menjadi Dinas Perhubungan Kabupten Deli Serdang yang di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.46 tahun 2000, tentang Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ini Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten berpedoman pada Peraturan Daerah No.5 tahun 2007.

3.9.2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

1. Visi:

Deliserdang Yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.

2. Misi:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai deskripsi data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Dengan halnya, permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Fungsi Controlling Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui penyajian ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat mendukung proses analisis dan pembahasan penelitian secara lebih mendalam. Dengan demikian, deskripsi data yang disajikan diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penyajian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber yang memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui komunikasi berupa wawancara mendalam, sehingga informasi yang diperoleh bersifat rinci dan sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada; analisis ini berfokus pada fungsi controlling Dinas Perhubungan dalam menertibkan pungutan parkir liar dengan batasan lokasi penelitian pada Jalan

Dokter Sutomo dan Jalan Negara, yang dipilih karena merupakan area yang sering terjadi praktik parkir liar sehingga relevan untuk melihat sejauh mana efektivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari empat orang narasumber yang terdiri dari perwakilan Dinas Perhubungan, juru parkir resmi, juru parkir tidak resmi, dan masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan serta mengumpulkan data pendukung penelitian. Data yang diperoleh berupa jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan penelitian, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis pada bab ini. Berikut merupakan penyajian data hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Deli Serdang.

4.1.1 Penetapan Standar Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB oleh Bapak Amri Ananda Rangkuti Selaku Kasi Perparkiran khusus daerah Kabupaten Deli Serdang bahwasannya:

“Penetapan standar kinerja dalam pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur penertiban pungutan parkir liar. SOP tersebut menjadi pedoman bagi petugas dalam bertindak, termasuk penanganan pelanggaran yang dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pendekatan persuasif berupa pemberian nasihat terhadap pelanggaran kecil. Selain itu, standar kinerja juga ditetapkan melalui penggunaan atribut resmi juru parkir seperti rompi, bet (identitas), sepatu, dan topi sebagai tanda legalitas. Penempatan juru parkir juga harus sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan, sehingga standar ini berfungsi sebagai acuan dalam membedakan juru parkir resmi dengan yang tidak resmi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 14.00 WIB dengan Wahyu selaku juru parkir resmi bahwasannya:

“Penetapan standar kinerja bagi juru parkir resmi telah ditentukan oleh dinas terkait melalui aturan yang jelas. Juru parkir resmi diwajibkan menggunakan atribut lengkap seperti rompi dan identitas resmi, memberikan karcis kepada pengguna jasa, serta menjaga ketertiban kendaraan di lokasi parkir. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi keberadaan juru parkir liar di wilayah tugasnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan standar tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan juru parkir resmi dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelaku parkir liar, sehingga fungsi pengawasan yang diharapkan belum berjalan maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB dengan Kurnianto selaku juru parkir liar bahwasannya:

“Diketahui bahwa standar kinerja bagi juru parkir resmi sebenarnya telah ditetapkan dengan cukup jelas, seperti kewajiban menggunakan atribut resmi, memberikan karcis, serta mengatur kendaraan di lokasi yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya di lapangan, standar tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya ketegasan petugas dalam menjalankan tugas serta fokus pengawasan yang hanya pada titik-titik tertentu. Kondisi tersebut membuka peluang bagi juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak terpantau, sehingga menunjukkan bahwa penerapan standar kinerja masih belum konsisten dan belum merata”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 16.00 WIB dengan Andi selaku masyarakat bahwasannya:

“Standar kinerja juru parkir resmi sebenarnya sudah jelas, seperti penggunaan atribut resmi, pemberian karcis, dan menjaga keamanan kendaraan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas yang tidak menjalankan standar tersebut secara konsisten, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara juru parkir resmi dan liar”.

4.1.2 Pengukuran Kinerja Aktual

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB oleh Bapak Amri Ananda Rangkuti Selaku Kasi Perparkiran khusus daerah Kabupaten Deli Serdang bahwasannya:

“Pengukuran kinerja aktual dalam pengawasan dan penertiban parkir liar dilakukan melalui berbagai cara, yaitu laporan rutin dari petugas, inspeksi langsung ke lapangan, pengaduan masyarakat, serta penggunaan sistem online. Metode ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya mengintegrasikan berbagai sumber informasi dalam menilai kinerja di lapangan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengukuran kinerja belum sepenuhnya optimal karena luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup banyak kecamatan serta keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan masih adanya praktik pungutan parkir liar yang belum terpantau secara menyeluruh”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 14.00 WIB dengan Wahyu selaku juru parkir resmi bahwasannya:

“Pengukuran kinerja aktual dalam pengawasan parkir liar dilakukan melalui kegiatan pemantauan oleh petugas dinas di lapangan. Berdasarkan informasi dari informan, pemantauan tersebut memang dilakukan, tetapi belum berlangsung secara rutin setiap hari. Biasanya pengawasan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat adanya laporan dari masyarakat atau kegiatan penertiban khusus. Di lokasi rawan seperti Jalan Dr. Sutomo dan sekitar Masjid Agung, kehadiran petugas masih bersifat insidental. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum berjalan secara konsisten, sehingga praktik parkir liar masih sering muncul kembali setelah kegiatan pemantauan selesai dilakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB dengan Kurnianto selaku juru parkir liar bahwasannya:

“Pengukuran kinerja aktual dalam pengawasan parkir liar di lapangan dinilai masih belum optimal. Berdasarkan keterangan informan, pemantauan oleh petugas memang dilakukan, tetapi tidak secara rutin dan

cenderung hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat operasi atau razia. Setelah kegiatan tersebut selesai, pengawasan kembali longgar sehingga praktik parkir liar dapat beroperasi kembali. Selain itu, waktu pemantauan yang dapat diprediksi membuat efektivitas pengawasan menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan belum konsisten dan belum mampu mencerminkan kondisi nyata secara berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16

Maret 2026 Pukul 16.00 WIB dengan Andi selaku masyarakat bahwasannya:

“Pengukuran kinerja aktual melalui pemantauan lapangan dinilai masih kurang optimal karena tidak dilakukan secara rutin. Pengawasan biasanya hanya terjadi pada waktu tertentu, seperti saat penertiban, sehingga setelah itu praktik parkir liar kembali muncul, terutama di lokasi ramai seperti Jalan Dr. Sutomo dan sekitar Masjid Agung”.

4.1.3 Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16

Maret 2026 Pukul 13.00 WIB oleh Bapak Amri Ananda Rangkuti selaku Kasi

Perparkiran khusus daerah Kabupaten Deli Serdang bahwasannya:

“Perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya juru parkir liar serta ketidaksesuaian antara identitas juru parkir dengan lokasi penugasan. Dalam hal pencapaian target retribusi, Dinas Perhubungan telah menerapkan sistem pembayaran yang transparan melalui rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan metode digital seperti QRIS, sehingga memudahkan pemantauan setoran. Namun, masih diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pihak yang belum memenuhi kewajibannya. Selain itu, perbandingan antar lokasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat pelanggaran lebih tinggi, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16

Maret 2026 Pukul 14.00 WIB dengan Wahyu selaku juru parkir resmi

bahwasannya:

“Jika dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, kondisi aktual di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Meskipun aturan

mengenai pengelolaan parkir sudah jelas, pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya juru parkir liar yang beroperasi, terutama di titik-titik yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Keberadaan parkir liar tersebut mencerminkan bahwa pengawasan belum merata dan belum efektif. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara target yang ingin dicapai dengan realitas di lapangan, yang menunjukkan bahwa implementasi standar kinerja masih perlu ditingkatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB dengan Kurnianto selaku juru parkir liar bahwasannya:

“Jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, kondisi kinerja aktual di lapangan masih jauh dari harapan. Meskipun aturan mengenai pengelolaan parkir telah ada, pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya titik parkir liar yang beroperasi tanpa hambatan, khususnya di lokasi-lokasi yang ramai. Ketidaksesuaian antara standar dan realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar, di mana pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kinerja masih belum mampu mengatasi permasalahan parkir liar secara signifikan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 16.00 WIB dengan Andi selaku masyarakat bahwasannya:

“Jika dibandingkan dengan standar yang ada, kondisi di lapangan masih belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya pungutan parkir tanpa karcis dan keberadaan juru parkir liar, yang menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara efektif”.

4.1.4 Tindakan Korektif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 13.00 WIB oleh Bapak Amri Ananda Rangkuti Selaku Kasi Perparkiran khusus daerah Kabupaten Deli Serdang bahwasannya:

“Tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar meliputi pemantauan langsung di lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait

seperti kepolisian, Satpol PP, dan pihak kecamatan. Upaya ini menunjukkan adanya sinergi antar lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, direncanakan adanya pembinaan bersama untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. Ke depan, tindakan korektif perlu diperkuat melalui peningkatan monitoring terhadap atribut juru parkir, verifikasi kesesuaian nomor bet dengan wilayah tugas, serta penegasan perbedaan antara parkir resmi dan parkir liar. Dengan langkah tersebut, diharapkan fungsi pengendalian dapat berjalan lebih optimal dalam menekan praktik pungutan parkir liar dan meningkatkan penerimaan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 14.00 WIB dengan Wahyu selaku juru parkir resmi bahwasannya:

“Tindakan korektif yang diperlukan ke depan adalah peningkatan intensitas dan pemerataan pengawasan di seluruh titik rawan parkir liar. Selain itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggaran agar memberikan efek jera. Penambahan jumlah petugas di lapangan juga menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh wilayah dapat terawasi dengan baik. Di samping itu, koordinasi antara dinas terkait dan juru parkir resmi perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan fungsi pengendalian dapat meningkat dan praktik pungutan parkir liar dapat diminimalisir”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB dengan Kurnianto selaku juru parkir liar bahwasannya:

“Tindakan korektif yang perlu dilakukan ke depan, berdasarkan pandangan informan, adalah meningkatkan intensitas dan konsistensi pengawasan di lapangan. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan secara rutin, tetapi juga tidak dapat diprediksi waktunya agar dapat menekan ruang gerak parkir liar. Selain itu, diperlukan ketegasan petugas dalam menindak pelanggaran serta penambahan jumlah personel agar seluruh titik parkir dapat terawasi dengan baik. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar lebih memilih menggunakan jasa parkir resmi. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, maka diharapkan praktik parkir liar dapat diminimalisir dan fungsi pengendalian dapat berjalan lebih efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 16.00 WIB dengan Andi selaku masyarakat bahwasannya:

“Tindakan korektif yang diperlukan adalah peningkatan pengawasan yang lebih rutin dan konsisten, disertai ketegasan dalam penindakan pelanggaran. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar lebih memilih parkir resmi, sehingga praktik parkir liar dapat diminimalisir”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penetapan Standar Kinerja

Penetapan standar kinerja merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengendalian (controlling), karena menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Standar kinerja biasanya disusun berdasarkan tujuan organisasi, kebijakan yang berlaku, serta pedoman operasional yang telah ditetapkan.

Penetapan standar kinerja dalam pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. SOP tersebut mengatur mekanisme penertiban pungutan parkir liar, termasuk langkah penindakan yang dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat pembagian kewenangan antar instansi seperti kecamatan dan Satpol PP pada lokasi tertentu, yang menunjukkan bahwa pengawasan parkir dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga.

Standar kinerja juga diwujudkan dalam bentuk ketentuan bagi juru parkir resmi, seperti kewajiban menggunakan atribut lengkap berupa rompi, bet (identitas), sepatu, dan topi, serta memberikan karcis kepada pengguna jasa. Atribut

tersebut berfungsi sebagai tanda legalitas sekaligus alat kontrol visual bagi masyarakat untuk membedakan antara juru parkir resmi dan liar. Selain itu, setiap juru parkir memiliki wilayah kerja tertentu yang harus sesuai dengan nomor identitas yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan di lapangan.

Namun, dalam pelaksanaannya standar kinerja tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten. Masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap serta praktik parkir liar di beberapa titik yang kurang terpantau. Kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan dan keterbatasan kewenangan juru parkir resmi dalam melakukan penindakan juga menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar telah ditetapkan dengan jelas, implementasinya masih perlu diperkuat agar dapat berjalan secara efektif dan merata.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Aktual

Pengukuran kinerja aktual dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lapangan telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang akurat mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana, baik melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

Pengukuran kinerja aktual dalam pengawasan parkir liar dilakukan melalui beberapa metode, yaitu laporan rutin dari petugas, inspeksi langsung ke lapangan, pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan sistem online. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya mengintegrasikan

berbagai sumber informasi dalam menilai kondisi di lapangan. Dengan adanya kombinasi metode tersebut, diharapkan pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengukuran kinerja di lapangan masih belum optimal. Pemantauan langsung oleh petugas belum dilakukan secara rutin dan cenderung bersifat insidental, misalnya saat adanya laporan masyarakat atau kegiatan penertiban tertentu. Di beberapa lokasi rawan seperti Jalan Dr. Sutomo dan sekitar Masjid Agung, pengawasan masih belum konsisten sehingga praktik parkir liar kerap muncul kembali setelah kegiatan penertiban selesai dilakukan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengukuran kinerja. Luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup banyak kecamatan membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh setiap waktu. Akibatnya, masih terdapat aktivitas parkir liar yang tidak terpantau secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang ada belum sepenuhnya mampu mencerminkan kondisi nyata di lapangan secara konsisten.

4.2.3 Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar Kinerja

Perbandingan antara kinerja aktual dengan standar kinerja merupakan tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui adanya kesenjangan (gap) antara apa yang direncanakan dengan apa yang telah dicapai. Dalam penelitian ini, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Perbandingan antara kinerja aktual dengan standar kinerja menunjukkan bahwa secara administratif, beberapa aspek telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah sistem pengelolaan retribusi parkir yang telah dilakukan secara transparan melalui rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan metode pembayaran digital seperti QRIS. Sistem ini memudahkan pemantauan setoran serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.

Namun, jika dilihat dari kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi. Praktik parkir liar masih ditemukan di berbagai titik, serta adanya ketidaksesuaian antara identitas juru parkir dengan wilayah penugasannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan.

Perbandingan kinerja juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pelanggaran antar lokasi, khususnya pada daerah dengan aktivitas tinggi yang cenderung lebih rentan terhadap praktik parkir liar. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pengawasan belum merata dan masih memerlukan peningkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

4.2.4. Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan langkah lanjutan yang diambil setelah diketahui adanya perbedaan antara kinerja aktual dengan standar yang telah

ditetapkan. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan.

Tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar meliputi pemantauan langsung ke lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, Satpol PP, dan pihak kecamatan. Upaya ini menunjukkan adanya sinergi antar lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Selain itu, direncanakan pula kegiatan pembinaan bersama guna menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.

Terdapat dari tindakan korektif juga diarahkan pada peningkatan intensitas dan konsistensi pengawasan di seluruh titik rawan. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan secara rutin, tetapi juga secara tidak terjadwal agar tidak mudah diprediksi oleh pelaku parkir liar. Penambahan jumlah petugas serta peningkatan ketegasan dalam penindakan menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera dan meminimalisir pelanggaran.

Tindakan korektif perlu diperkuat melalui sistem monitoring yang lebih ketat, khususnya dalam hal verifikasi atribut juru parkir dan kesesuaian wilayah tugas. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar lebih memilih menggunakan jasa parkir resmi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fungsi controlling dapat berjalan lebih efektif dalam menekan praktik pungutan parkir liar serta meningkatkan penerimaan daerah secara optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang:

- a) Standar kinerja pengawasan parkir telah ditetapkan melalui SOP, atribut resmi juru parkir (rompi, bet identitas, topi, sepatu), pemberian karcis, dan penempatan wilayah tugas, namun pelaksanaannya belum optimal karena pendekatan persuasif pada pelanggaran kecil dan keterbatasan kewenangan petugas.
- b) Pengukuran kinerja aktual dilakukan melalui laporan rutin petugas, inspeksi lapangan, pengaduan masyarakat, dan sistem online, tetapi tidak berjalan rutin dan konsisten, terutama di wilayah luas Kabupaten Deli Serdang.
- c) Terdapat kesenjangan antara standar kinerja dan realitas lapangan, ditandai dengan masih maraknya juru parkir liar di titik rawan seperti Jalan Dlr. Sutomo dan sekitar Masjid Agung, meskipun sistem retribusi digital (QRIS) telah diterapkan untuk transparansi PAD.
- d) Pengawasan bersifat insidental (hanya saat razia atau laporan), sehingga parkir liar mudah muncul kembali setelah penertiban.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran - saran dalam Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang:

- a) Tingkatkan intensitas pengawasan dengan jadwal tak terduga, penambahan personel petugas, dan monitoring rutin di seluruh titik rawan parkir.
- b) Perkuat koordinasi antar instansi (Dinas Perhubungan, Polisi, Satpol PP, kecamatan) melalui pembinaan bersama dan sinergi penindakan.
- c) Lakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang ciri juru parkir resmi (atribut lengkap, karcis) untuk mendorong pemilihan layanan legal dan pelaporan pelanggaran.
- d) Tindak tegas pelanggaran dengan verifikasi beridentitas sesuai wilayah tugas, penerapan sanksi hukum, dan efek jera bagi juru parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, T. A. S., & Saputra, A. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Implementation Of Regional Regulation Number 3 Of 2019 In The Framework Of Complaints Services* . 1(2), 127–136.
- Arianty, G. W. (2024). *Monitoring Parkir oleh Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu, *Jurnal Warta* Edisi: 50, ISSN: 1829-7463, Oktober (2016). *Jurnal Warta*, 53(9), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/290701-implementasi-poac-terhadap-kegiatan-orga-bdca8ea0.pdf>
- Elva Novitasari, Indarja, U. S. H. (2019). *Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Penataan Transportasi Elva Novitasari, Indarja , Untung Sri Hardjanto Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website. 8, 2492–2509.*
- Halim, A., & Nugroho, R. (2019). Inovasi pelayanan publik di sektor transportasi darat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 112–120.
- Hidayat, R. (2020). Manajemen perparkiran dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di perkotaan. *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–110.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Rencana strategis Kementerian Perhubungan 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Khairi, M. P. Al, Amrizal, D., Studi, P., Administrasi, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kesehatan di Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Implementation of Langkat Regent Regulation Number 4 of 2021 In Order to Improve Health Discipline in Pul. 1(2), 145–152.*
- Malinda, F., & Syafruddin, S. (2022). Pengawasan Atasan Langsung Pelaksanaan Pemberian Vaksin Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Kotapinang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)*, 2(2), 85-96.
- Maskun, M., Wahyudi, M. F., & Manan, A. (2022). (2022). *Fungsi Manajemen Controlling dalam Prespektif Al Qurâ€™an dan Hadits*. 16(1), 29–38.
- Millah, A. R., Tanjiah, A., Mukti, S., & Suhertin, T. (2023). *Penerapan Fungsi Controlling Perspektif Islam*. 1(2), 89–95. <https://doi.org/10.59996/al->

fiqh.v1i1.231

- Moufad, I., & Jawab, F. (2020). *Mixed Applied Survey Methodology For Plan-*. 55(3), 95–110. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4237>
- Pratama, A., & Lestari, D. (2021). Efektivitas pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–53.
- Putra, R., & Anggraini, S. (2021). Pengawasan lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban transportasi perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55–63.
- Rifaldi Dwi Syahputra, & Nuri Aslami. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Sandra, C. (2024). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Pada Ruang Manfaat Jalan Di Kota Palembang*. https://repository.unsri.ac.id/141817/3/Rama_74201_02011182025008_0012046302_0027098104_01_front_ref.pdf
- Siregar, M. (2019). Peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di kota besar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 78–85.
- Wicahyaningtyas, M. (2022). Controlling dalam Perspektif Al Qur'an dan Al Hadits. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 30-47.
- Yusnidar Lase, A. B. N. (2023). *Keywords: Training, Competency Development, Civil Servant, Gunungsitoli District Court, Public Service, Organizational Performance*. 10(3), 1804–1814.

 *Reza Dwi Wicak*
15/10/2024

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KABUPATEN DELI
SERDANG

I. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan :
- d. Unit Kerja :
- e. Umur :

II. Waktu Penelitian

- a. Hari / Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Lokasi :

III. Daftar Pertanyaan

a. Penetapan Standar Kinerja

1. Bagaimana Dinas Perhubungan menetapkan standar kinerja dalam pengawasan parkir, khususnya terkait penertiban pungutan parkir liar di Jalan Dokter Sutomo, dan Jalan Negara Tj. Garbus I?

2. Apakah sudah ada SOP tertulis khusus terkait pengawasan dan penertiban parkir liar? Jika ada, sejauh mana SOP tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh petugas di lapangan?
3. Bagaimana standar tugas dan tanggung jawab ditetapkan bagi petugas lapangan/juru parkir resmi dalam mengawasi dan mencegah praktik pungutan parkir liar?

b. Pengukuran Kinerja Aktual

1. Bagaimana cara Dinas Perhubungan mengukur kinerja aktual pengawasan dan penertiban parkir liar di wilayah Lubuk Pakam (misalnya melalui laporan rutin, inspeksi mendadak, atau pengaduan masyarakat)?
2. Seberapa sering dilakukan pemantauan langsung di lapangan pada lokasi-lokasi rawan pungutan parkir liar seperti sekitar Masjid Agung di Jalan Negara, dan Jalan Dokter Sutomo?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penilaian kinerja yang ada sekarang sudah mencerminkan kondisi di lapangan, atau masih ada hal yang belum terpantau? Bisa dijelaskan?

c. Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar Kinerja

1. Jika dibandingkan dengan standar atau target yang sudah ditetapkan, bagaimana Bapak/Ibu menilai kondisi aktual pengawasan parkir liar di Kabupaten Deli Serdang saat ini?
2. Apabila ditemukan perbedaan antara target dan hasil (misalnya masih banyak juru parkir ilegal atau pungutan tidak masuk ke kas daerah),

bagaimana hal tersebut didiskusikan dan ditindaklanjuti di internal Dinas?

3. Apakah pernah dilakukan perbandingan kinerja antar titik/lokasi (misalnya membandingkan Jalan Dokter Sutomo dengan Jalan Negara, Tj. Garbus I) untuk melihat mana yang paling jauh menyimpang dari standar dan mengapa?

d. Tindakan Korektif

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana tindakan korektif yang sudah dilakukan mampu mengurangi praktik parkir liar dan meningkatkan pemasukan retribusi resmi ke kas daerah?
2. Bagaimana koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain (Polsek, Satlantas, Satpol PP, kecamatan) dalam menjalankan tindakan korektif terhadap pungutan parkir liar?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Ke depan, tindakan korektif apa yang perlu diperkuat atau ditambahkan agar fungsi controlling terhadap pungutan parkir liar berjalan lebih efektif di Kabupaten Deli Serdang?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menjabar aurat ini agar disetujui nomor dan langkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Pasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 05 November 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Adera Adelia Br. Sinaga
 N P M : 2203100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,68

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

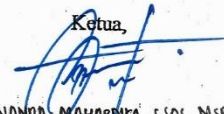
| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Fungsi Controlling Dinas Perhubungan dalam menertibkan Pungutan Parkir liar di Kabupaten Deli Serdang | 7/11 2025 <i>Asst</i> |
| 2 | Analisis Tantangan Sahpol pp dalam Mengatasi Penataan Pedagang Kaki Lunta di Kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang | |
| 3 | Kualitas smart city di Kabupaten Deli serdang sebagai Upaya Mewujudkan Kota Cerdas | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.


Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl.20....

Ketua,

 (ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si.)
 NIDN:

OSI
 Dr. Agung Saputra M.AP.

Pemohon,


 (...Adera Adelia Br. Sinaga...)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:.....

(...Dr. Agung Saputra, S.Sos., M.AP.)
 NIDN:





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2063/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ADZRA ADELIA BR SINAGA**
 N P M : 2203100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KABUPATEN DELI SERDANG**
 Pembimbing : **Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 031.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 27 Djumadil Awal 1447 H
 18 November 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
 NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini harap dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/P7/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 23 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Adira Adelia Br. Sinaga
NPM : 2203100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 031.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025.. tanggal 23 Desember 2025.. dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN
PUNGUTAN PARKIR LAR DI KABUPATEN DELI SERPANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Peretujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(ANANDA MAHARDIKA, S.Si, M.P)

NIDN:

Menyetujui

Pembimbing

(R. AGUNG SARUTEA, S.Si, M.P)

NIDN:

Pemohon,

(Adira Adelia Br. Sinaga)



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualification Agency

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 27/UND/13.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PEMBIMBING | JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | ADE WILLIANIE PUTRI | 2203100063 | RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. | FUNGSI CONTROLLING CAMAT DALAM PROSES PENGURUSAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA |
| 2 | AZRA ADELIA BR SINAGA | 2203100046 | KHAJIDIR ALI, S.Sos., MPA. | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. | FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LAR DI KABUPATEN DELI SERDANG |
| 3 | ASTHA SALSABILA | 2203100046 | Dr. DEDI AMRZAL, S.Sos., M.SI. | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. | STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI KINERJA GURU DI SD NEGERI 101793 DESA KLIMPANG KAMPUNG |
| 4 | KARINA AMANDA | 2203100012 | WINDA S WELAJA, S.Sos., MSP. | Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.SI. | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN ASAHAN |
| 5 | NOVIA FITRIANI | 2203100044 | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H. | Dr. DEDI AMRZAL, S.Sos., M.SI. | EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING UNIT LAYANAN DISABILITAS DI KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN |

Mesjid 17 Ralat 1447 H
08 Januari 2026 M

Masjid Prof. Dr. Arifin Saleh, (MSP.)

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA

Logo of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) and other institutional logos (BRBT, MQA, STARS).



UMSU

Unggul • Cerdas • Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XIU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Adzra Adelia Br. Sinaga
 N P M : 2203100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Controlling Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan parkir liar di kabupaten Deli Serdang

| No. | Tanggal | Kegiatan Advisi/Bimbingan | Daraf Pembimbing |
|-----|------------|--|------------------|
| 1. | 27-10-2025 | Penetapan Judul / konsultasi | ✓ |
| 2. | 03-11-2025 | Bimbingan latar Belakang | ✓ |
| 3. | 07-11-2025 | ACC Judul & Penetapan Dosen Pembimbing | ✓ |
| 4. | 17-11-2025 | Bimbingan proposal I | ✓ |
| 5. | 04-12-2025 | Bimbingan proposal II | ✓ |
| 6. | 23-12-2025 | ACC seminar proposal | ✓ |
| 7. | 13-02-2026 | Bimbingan dan ACC Draft Wawancara | ✓ |
| 8. | 30-03-2026 | Bimbingan Tugas Akhir I | ✓ |
| 9. | 06-04-2026 | Bimbingan Tugas Akhir II | ✓ |
| 10. | 09-04-2026 | ACC sidang | ✓ |

Medan, 08 April 2026.



(Dr. Azzin Saleh, S.Sos., MSP.)
 NIDN :

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahaidika, S.Sos., MSP.)
 NIDN :

Pembimbing,

(Dr. Agung Saputra, S.Sos., MAP)
 NIDN :





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 358/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Sya'ban 1447 H
13 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama mahasiswa : **ADZRA ADELIA BR SINAGA**
N P M : 2203100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **FUNGSI CONTROLLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



DE. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. (061) - 7952964

Pos-el:bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

Laman:kesbangpol.deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 270

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 358/KET/II.3.AU/UMSU-03/F//2026 tanggal 13 Februari 2026 hal Permohonan Izin Riset Penelitian, oleh :
 - a. Nama : Adzra Adelia Br. Sinaga
 - b. Alamat : Dusun I Jln. Bakaran Batu Gg. Bunga Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207025111030006
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Fungsi Controlling Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
 - h. Lama : 2 (dua) Minggu
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 02 Maret 2026

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS**

JEFFREY SIREGAR, SP., M.Si
 Pembina Tingkat I / IV/b
 NIP. 19691015 199602 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. Bappeda Litbang Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
 Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
 Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id
 Laman: <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 05 Maret 2026

Nomor : 000.9 / 2446
 Sifat : Biasa/Terbuka
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

di
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/270 tanggal 02 Maret 2026 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 358/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Izin Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : Adzra Adelia Br. Sinaga
 b. Alamat : Dusun I Gg. Bunga Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
 c. NIP/NIM/KTP : 1207025111030006
 d. Pekerjaan : Mahasiswa
 e. Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
 f. Judul/Tema : Fungsi *Controlling* Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang
 g. Daerah/Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
 h. Lama : 2 (dua) Minggu
 i. Peserta : Sendiri
 j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
 NIP. 196605061992031004

Tembusan:

1. Bupati Deli Serdang
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mawar No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos-20514
Pos.el: dinasperhubungan.deliserdang@gmail.com
Laman: www.dishub.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 15 April 2026

Nomor : 000.1.11/796 /PHB/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat.

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor 000.9/2446 Tanggal 05 Maret 2026 hal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bahwa :

Nama : Adzra Adelina Br. Sinaga
Alamat : Dusun I Gg. Bunga Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam
NIK : 1207025111030006
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyelesaikan riset/penelitiannya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dengan judul Fungsi Controlling Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Pungutan Parkir Liar di Kabupaten Deli Serdang di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang .

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Deli Serdang

Suryadi A. Ronang, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181990101002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

Bila membuat surat ini, agar disebutkan
 nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02034/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Adzra Adelia Br. Sinaga
NPM : 2203100045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UMSU

Medan, 19 Syawal 1447 H
 07 April 2026 M

Unggul | Cerdas | Terampil



Kepala Perpustakaan,

[Signature]
 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Shk-10



UMSU
UIN Sumatera Utara

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 897/JUND/III.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Ujian Tugas Akhir |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 16 | DWI ANJANI | 2203100048 | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP | KHADIR ALI, S.Sos, M.Pd | RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUCAPIL KOTA MEDAN |
| 17 | LASNATI ZAMLI | 2203100088 | Dr. SITIHAJAR, S.Sos, M.SP | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos, MAP | KHADIR ALI, S.Sos, M.Pd | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBIAYAAN PEMAKA JALAN DI KOTA MEDAN |
| 18 | INTAN PERMATTA HATI NST | 2203100031 | Dr. NAILI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd | RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA | Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | EVALUASI PROGRAM PUA INDAH DALAM TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU |
| 19 | ADE WILLIANIE PUTRI | 2203100053 | Dr. NAILI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd | KHADIR ALI, S.Sos, M.Pd | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos, MAP | FUNGSI CONTROLING CAMAT DALAM PROSES PENGURUSAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA |
| 20 | ADZRA ADELIA SR SINAGA | 2203100045 | Dr. NAILI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd | WINIDA S MELIALA, S.Sos, MSP | Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos, MAP | FUNGSI CONTROLING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR LUAR DI KABUPATEN DELI SERDANG |

Menulis Sidang:

1.

Diperikan oleh:

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.
Wakil Rektor I

Ketua,

Asoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom






LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Adzra Adelia Br. Sinaga

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Fungsi Controlling Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pungutan Liar di Kabupaten Deli Serdang*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

DOKUMENTASI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG



Sumber: Wawancara dan Foto Bersama Bapak Amri Ananda Rangkti Selaku Kasi Perparkiran.



Sumber: Wawancara dan Foto Bersama Wahyu Selaku Juru Parkir Resmi.



Sumber: Wawancara dan Foto Bersama Kurnianto Selaku Juru Parkir Liar.



Sumber: Wawancara dan Foto Bersama Andi selaku Masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Adzra Adelia Br Sinaga
NPM : 2203100045
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 11-November-2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I Jl. Bakaran Batu GG Bunga Lubuk
Pakam
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Abdul Haris Sinaga
Nama Ibu : Mismawati
Alamat : Dusun I Jl. Bakaran Batu GG Bunga Lubuk
Pakam

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101898
2. MTs N 2 Deli Serdang
3. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam
4. Tahun 2022-2026, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 April 2026



Adzra Adelia Br Sinaga